

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Tugas Pokok dan Fungsi

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian sebagai unit kerja pengawasan internal memiliki peran mendorong pencapaian tujuan dan efektifitas pelaksanaan tugas - tugas organisasi serta mencegah terjadinya penyimpangan, pemborosan, dan penyelewengan dari unit-unit kerja dilingkungan Kementerian Perindustrian.

Untuk kelancaran tugas-tugas pengawasan tersebut diperlukan dukungan teknis, administrasi dan manajemen pelaksanaan kegiatan yang secara fungsional dilaksanakan oleh Inspektorat I.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal. Pada peraturan tersebut menyatakan bahwa Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan **Sekretariat Jenderal** dan **Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri**.

Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program pengawasan internal;
2. Pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
5. Pelaksanaan urusan tata usaha dan manajemen kinerja Inspektorat I.

## **B. Latar Belakang Kegiatan/Program**

Agar fungsi pengawasan tersebut dapat terselenggara dengan baik, telah disusun program kegiatan tahun 2020 dengan didasarkan pada arah dan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang akan di tempuh.

Pelaksanaan kegiatan/program dilatarbelakangi oleh kebijakan pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal dalam tahun 2020 adalah :

1. Optimalisasi peran pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan berbasis pada pembinaan, dimana Inspektorat Jenderal tidak hanya melaksanakan fungsi pemeriksaan, tetapi juga sebagai *Counseling Partner* (Mitra Kerja).
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengawasan yang cerdas dan profesional sesuai dengan kompetensi yang di butuhkan.
3. Penyempurnaan sistem dan prosedur dalam pengawasan dalam upaya mewujudkan ketaatan, ketertiban, efisiensi, efektivitas dan ekonomis dalam pelaksanaan tugas.

Kebijakan pelaksanaan kegiatan yang akan diselenggarakan:

1. Melaksanakan pengawasan berbasis kinerja dengan mengedepankan aspek pembinaan kepada seluruh satuan kerja dalam menjamin tercapainya program dan sasaran kinerja auditi;
2. Meningkatkan peran pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan program dan anggaran, pembinaan serta pengembangan industri;
3. Mewujudkan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel;
4. Meningkatkan profesional aparat pengawasan;
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana;
6. Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal;
7. Menerapkan audit berbasis resiko.

### **C. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat I terdiri dari:

#### **1. Subbagian Program dan Tata Usaha**

Subbagian Program dan Tata Usaha dipimpin oleh pejabat eselon IV yang mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga Inspektorat I.

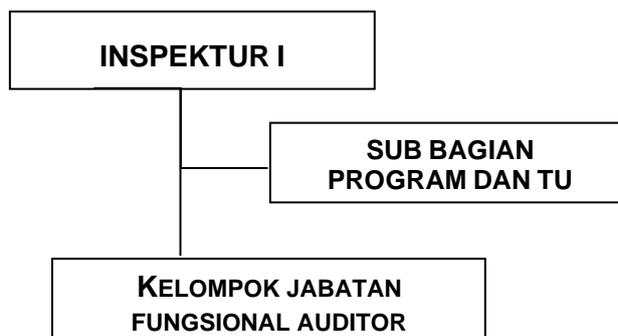
Subbagian Program dan Tata Usaha (TU) secara fungsional bertanggung jawab kepada Inspektur I dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Kepegawaian dan Hukum Organisasi.

#### **2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.**

Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional auditor terdiri dari sejumlah jabatan fungsional auditor yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Kelompok jabatan fungsional auditor dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur.

Bagan Struktur Organisasi Inspektorat I Kementerian Perindustrian sebagai berikut:



## BAB II

### RENCANA PROGRAM/KEGIATAN

#### A. Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Program Inspektorat Jenderal adalah "Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian", dan kegiatan Inspektorat I adalah **Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat I.**

Dalam melaksanakan program/kegiatan tersebut Inspektorat I pada tahun 2020 semula memperoleh anggaran sebesar Rp 3.400.000.000,-. Pada riwulan III Inspektorat I mengalami revisi pemotongan anggaran akibat pandemik Covid 19, sehingga anggaran menjadi **Rp 1.715.273.000,-** Pada tahun 2020 terdapat perubahan target pada kegiatan monev menjadi 1 kegiatan dan ada penambahan sub kegiatan pada kegiatan Consulting, tersaji pada tabel 1 dan 2 yaitu:

Tabel 1. Program/Kegiatan Pengawasan Inspektorat I Tahun 2020

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	KET
1.	Manajemen Kinerja Pengawasan dan Pelaporan Kinerja Pengawasan Inspektorat I	7 Laporan	
2.	Reviu Laporan Keuangan dan BMN Unit Kerja Cakupan Inspektorat I	60Laporan	
3.	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri Cakupan Tugas Inspektorat I	1 Laporan	
4.	Consulting Kegiatan Berisiko Tinggi Cakupan Tugas Inspektorat I	1 Laporan	
5.	Layanan Audit Internal Inspektorat I	1 Layanan	

Dalam melaksanakan program/kegiatan tersebut alokasi anggaran kegiatan Inspektorat I sebagai berikut:

Tabel 2. Alokasi Anggaran Inspektorat I Tahun 2020

KODE	Uraian Program / Kegiatan / Output / Jenis Belanja	VOLUME	JUMLAH (Rp,-)
<b>1841</b>	<b>Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat I</b>		<b>1.715.273.000</b>
<b>1841.001</b>	<b>Manajemen Kinerja Pengawasan dan Pelaporan Kinerja Pengawasan Inspektorat I</b>	<b>7 Laporan</b>	<b>202.300.000</b>
1841.001.051	Penyusunan Program Kerja dan Anggaran		24.760.000
A	Koordinasi Penyusunan Dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat I		21.380.000
B	Penyusunan Anggaran Inspektorat I Tahun 2021		3.380.000
1841.001.052	Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas		6.760.000
A	Pembahasan Rencana Aksi Hasil Evaluasi Lainnya		3.380.000
B	Koordinasi dan Penyusunan LAKIP Inspektorat I		3.880.000
1841.001.053	Peningkatan Peran Pengawasan Lainnya		170.780.000
A	Koordinasi Peran Pengawasan Lainnya Cakupan Tugas Inspektorat I		170.780.000
<b>1841.002</b>	<b>Reviu Laporan Keuangan dan BMN Unit Kerja Cakupan Inspektorat I</b>	<b>60 Laporan</b>	<b>587.170.000</b>
1841.002.051	Reviu Laporan Keuangan dan BMN Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I		586.170.000
A	Koordinasi dan Pelaksanaan Reviu		36.380.000
B	Pelaksanaan Reviu Pengendalian Atas Pelaporan Keuangan (LK-BMN)		527.470.000
C	Pelaksanaan Reviu Pengendalian Atas Pelaporan Keuangan (PIPK)		22.320.000

1841.002.052	Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Cakupan Tugas Inspektorat I		1.000.000
A	Koordinasi dan Pelaksanaan Reviu RKBMN		1.000.000
<b>1841.003</b>	<b>Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri Cakupan Tugas Inspektorat I</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>3.000.000</b>
1841.003.051	Monev SAKIP Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I		3.000.000
A	Koordinasi dan Pelaksanaan Penilaian Implementasi SAKIP		3.000.000
<b>1841.004</b>	<b>Consulting Kegiatan Berisiko Tinggi Cakupan Tugas Inspektorat I</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>185.540.000</b>
1841.004.052	Konsultasi Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berisiko Tinggi		65.838.000
A	Koordinasi Pendampingan/Pengawasan Kegiatan Berisiko Tinggi dan Pembinaan Pengawasan Kinerja		3.400.000
B	Pelaksanaan Pendampingan/Pengawasan Satuan Kerja		24.626.000
C	Pelaksanaan Pembinaan Pengawasan Kinerja oleh Pimpinan		39.638.000
D	Koordinasi dan Pelaksanaan Pendampingan Implementasi Manajemen Risiko		62.116.000
E	Pengawasan Pelaksanaan Program Percepatan Penanganan Covid 19		55.760.000
<b>1841.965</b>	<b>Layanan Audit Internal</b>	<b>1 Layanan</b>	<b>737.263.000</b>
1841.965.052	Pelaksanaan Audit Internal		657.651.000
A	Koordinasi Audit Kinerja Program Pengembangan SDM Industri		21.880.000
B	Pelaksanaan Audit Kinerja Program Pengembangan SDM Industri		635.771.000
1841.003.053	Pelaksanaan Audit Khusus		11.800.000
A	Koordinasi dan Pelaksanaan Audit Dengan Tujuan Tertentu		11.800.000
1841.003.054	Tindak Lanjut Hasil Laporan Hasil Pemeriksaan LHP		55.312.000
A	Koordinasi dan Pelaksanaan		55.312.000

	Pendampingan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit		
1841.003.055	Reviu Perencanaan Anggaran		12.500.000
A	Koordinasi dan Pelaksanaan Reviu RKAKL		12.500.000

Pada triwulan III terdapat penambahan kegiatan yaitu Pengawasan Pelaksanaan Program Percepatan Penanganan Covid 19, sehingga terdapat realokasi penyesuaian anggaran pada Program/kegiatan Consulting Kegiatan Berisiko Tinggi cakupan tugas Inspektorat I dan Layanan Audit Internal

## B. Sasaran dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja Inspektorat I yang dilaksanakan pada tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 3. Sasaran dan Indikator Kinerja Inspektorat I dalam Perjanjian Kinerja

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Jenis Indikator	Target
<b>PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN</b>				
1.	Terwujudnya Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal pada cakupan tugas Inspektorat I	IKU	2,8%
		Jumlah maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat I	IKU	5%
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	IK	80%
		Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat I	IKU	91%

2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Nilai maturitas SPIP satker cakupan tugas Inspektorat I	IKU	3,6
<b>PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL</b>				
3.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	IK	75%
		Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	IK	76%
<b>PERSPEKTIF KELEMBAGAAN</b>				
4.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	IK	70%
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	IK	80%

## BAB III

### PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN

#### A. Hasil yang Telah Dicapai

Total anggaran Inspektorat I Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 1.715.273.000, - terdiri dari:

Tabel 4. Anggaran Inspektorat I Tahun 2020

No.	Kode	Uraian Program dan Kegiatan	Jumlah (Rp,-)
	<b>1841</b>	<b>Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat I</b>	<b>1.715.273.000</b>
1.	1841.001	Manajemen Kinerja Pengawasan dan Pelaporan Kinerja Pengawasan Inspektorat I	202.300.000
2.	1841.002	Reviu Laporan Keuangan dan BMN Unit Kerja Cakupan Inspektorat I	587.170.000
3.	1841.003	Monev Kebijakan Industri Cakupan Tugas Inspektorat I	3.000.000
4.	1841.004	Consulting Kegiatan Berisiko Tinggi Cakupan Tugas Inspektorat I	185.540.000
5.	1841.965	Layanan Audit Internal	737.263.000

Realisasi Inspektorat I sampai dengan Triwulan III tahun 2020 sesuai aplikasi PP39 telah mencapai 61,24% atau sebesar Rp. 1.050.433.185,- dari target 80,32%, sedangkan realisasi fisik sebesar 68,14% dari target fisik sebesar 82,53%.

Sesuai dengan aplikasi *e-Monitoring* yang bersumber dari aplikasi Analisa Laporan Kegiatan Internal (ALKI), realisasi anggaran

Inspektorat I pada Triwulan III telah mencapai 69,74% atau sebesar Rp. 1.196.231.390,- dari target 90,44%, realisasi fisik 72,38% dari target 87,93%. Dari aplikasi Sistem Aplikasi Satker (SAS) realisasi Inspektorat I pada Triwulan III telah mencapai 67.61% atau sebesar Rp. 1.159.715.152,-

Terdapat perbedaan realisasi anggaran pada aplikasi PP39 dengan aplikasi *e-Monitoring* ALKI yang disebabkan setidaknya ada 5 SPTJB yang belum diinput nomor dan tanggal SP2D oleh Bagian Keuangan Sekretariat Inspektorat Jenderal.

Realisasi fisik dan keuangan untuk pelaksanaan kegiatan Inspektorat I dapat dilihat pada Tabel 5. dan Tabel 6.

Tabel 5. Realisasi Fisik dan Keuangan untuk Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat I sesuai Aplikasi PP39

Jenis Kegiatan	PAGU Anggaran	Triwulan Ini			s/d Triwulan Ini			Sisa Anggaran s/d Triwulan IV			
		Fisik (%)	Keuangan (Rp,-)	%	Fisik (%)	Keuangan (Rp,-)	%	Fisik (%)	Keuangan (Rp,-)	%	
1	Manajemen Kinerja Pengawasan dan Pelaporan Kinerja Pengawasan Inspektorat I	202.300.000	3,34	23.264.500	11,50	37,12	102.015.940	50,18	62,88	100.785.860	49,82
2	Reviu Laporan Keuangan dan BMN Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	587.170.000	0	0	0	98,78	581.650.602	99,06	1,22	5.519.398	0,94
3	Monev Kebijakan Industri Cakupan Tugas Inspektorat I	3.000.000	0	999.900	33,33	60,00	999.900	33,33	40,00	2.000.100	66,67
4	Consulting Kegiatan Berisiko Tinggi Cakupan Tugas Inspektorat I	185.540.000	45,23	14.546.336	7,84	50,54	51.561.566	27,79	49,46	133.978.434	72,21
5	Layanan Audit Internal	737.263.000	53,93	38.780.034	5,26	57,71	314.737.575	42,69	42,29	422.525.425	57,31
<b>Total</b>		<b>1.715.273.000</b>	<b>28,47</b>	<b>77.530.340</b>	<b>4,52</b>	<b>68,14</b>	<b>1.050.433.185</b>	<b>61,24</b>	<b>31,86</b>	<b>664.839.815</b>	<b>38,76</b>

Tabel 6. Realisasi Fisik dan Keuangan untuk Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat I sesuai Aplikasi e – Monitoring

Jenis Kegiatan		PAGU Anggaran	Triwulan III			Sisa Anggaran	
			Fisik (%)	Keuangan (Rp,-)	%	Jumlah (Rp,-)	%
1	Manajemen Kinerja Pengawasan dan Pelaporan Kinerja Pengawasan Inspektorat I	202.300.000	73,12	140.396.100	69,40	61.903.900	30,60
2	Reviu Laporan Keuangan dan BMN Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	587.170.000	98,78	568.836.330	96,88	18.333.670	3,12
3	Monev Kebijakan Industri Cakupan Tugas Inspektorat I	3.000.000	60	1.000.000	33,33	2.000.000	66,67
4	Consulting Kegiatan Berisiko Tinggi Cakupan Tugas Inspektorat I	185.540.000	50,54	104.633.400	56,39	80.906.600	43,61
5	Layanan Audit Internal	737.263.000	56,54	328.678.222	44,58	408.584.778	55,42
<b>Total</b>		<b>1.715.273.000</b>	<b>72,38</b>	<b>1.143.544.052</b>	<b>66,67</b>	<b>571.728.948</b>	<b>33,33</b>

## B. Analisis Capaian Kinerja

Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2020 yang telah ditetapkan yaitu:

Tabel 6. Capaian Sasaran dan Indikator Kinerja Inspektorat I dalam Perjanjian Kinerja

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Jenis Indikator	Target	Realisasi	Keterangan
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN						
1.	Terwujudnya Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal pada cakupan tugas Inspektorat I	IKU	2,8%	0,15%	Realisasi Anggaran Kemenperin: Rp.3.368.036.653.338,00 temuan BPK: Rp.4.967.582.710,63, maka batas toleransi temuan material: 0,15%, telah mencapai target
		Jumlah maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat I	IKU	5%	Belum dapat diukur	Indikator ini belum dapat diukur, karena jumlah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti akan dibagi dengan total rekomendasi hasil selama 1 tahun. Rapat pleno akan ditentukan triwulan IV.
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	IK	80%	Belum dapat diukur	Sampai dengan Triwulan III pengaduan

						masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti pada cakupan Inspektorat I belum ada
		Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat I	IKU	91%	Belum dapat diukur	Pelaksanaan pada Triwulan IV
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Nilai maturitas SPIP satker cakupan tugas Inspektorat I	IKU	3,6	Belum dapat diukur	Pelaksanaan pada Triwulan I V
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL						
3.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	IK	75%	65%	Kegiatan audit telah dilaksanakan sebanyak 12 satker: 1 Pusat dan 11 vertikal. Pelaksanaan telah memenuhi standar pengawasan
		Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	IK	76%	Belum dapat diukur	Koordinasi dengan Set.Itjen
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN						
4.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	IK	70%	65%	Reviu LKMBN, Reviu PIPK, Audit pada 1 unit Pusat (Set.Itjen) dan Audit vertikal 11 Satker, Monev Sakip 38 satker Pusat dan vertikal, Consulting

						pada 1 unit Pusat (BPSDMI) dan 6 satker vertikal serta Pemantauan Sarpras pada 3 satker vertikal
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	IK	80%	70%	Kegiatan Reviu, Audit, Monev, Consulting dan Mankin sesuai dengan perannya

Sesuai data di atas, capaian kinerja untuk sasaran program/kegiatan **Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian** sebagai berikut:

1. Indikator kinerja; Batas toleransi temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat I  
Realisasi Anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2019 sebesar Rp. 3.368.036.653.338,00 sedangkan temuan BPK sebesar Rp. 4.967.582.710,63 maka diperoleh batas toleransi material pengawasan eksternal 0,15%. Indikator ini telah mencapai target.
2. Indikator kinerja; Jumlah maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat I  
Indikator ini belum dapat diukur pada triwulan III, karena jumlah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti akan dibagi dengan total rekomendasi hasil pengawasan selama 1 tahun. Pelaksanaan direncanakan pada triwulan berikutnya.
3. Indikator kinerja; Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti.  
Telah dilaksanakan pelayanan Klinik Konsultasi Inspektorat Jenderal, namun pengaduan masyarakat berkadar pengawasan pada cakupan

tugas Inspektorat I, namun sampai dengan bulan September 2020 (triwulan III) belum ada pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang perlu ditindaklanjuti, sehingga indikator ini belum dapat diukur.

4. Indikator kinerja; Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat I.

Indikator ini belum dapat diukur, pelaksanaan direncanakan pada triwulan berikutnya.

Capaian kinerja untuk sasaran program/kegiatan **Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik** sebagai berikut:

1. Indikator kinerja; Nilai SPIP satker cakupan tugas Inspektorat I

Indikator ini belum dapat diukur, pelaksanaan direncanakan pada triwulan berikutnya.

Capaian kinerja untuk sasaran program/kegiatan **Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif** sebagai berikut:

1. Indikator kinerja; Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan

Pelaksanaan pada kegiatan pada triwulan III merupakan kumulatif dari kegiatan triwulan I dan II. Pelaksanaan audit dilakukan pada 1 unit Pusat yaitu Sekretariat Jenderal dan 11 satker vertikal yaitu Poltek STTT Bandung, Poltek AKA Bogor, SMK-SMAK Bogor, BDI Jakarta, BDI Makassar, Poltek ATI Makassar, SMK-SMAK Makassar, SMK-SMTI Makassar, SMK-SMTI Bandar Lampung, SMK-SMTI Yogyakarta dan BDI Yogyakarta. Secara keseluruhan pelaksanaan audit telah mencapai 65%. Pada kegiatan ini tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan telah memenuhi standar pelaksanaan pengawasan. Pelaksanaan direncanakan pada triwulan berikutnya.

2. Indikator kinerja; Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)

Indikator ini belum dapat diukur, kegiatan dilaksanakan oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal, sedangkan Inspektorat I hanya berkoordinasi dengan Sekretariat Inspektorat Jenderal.

Capaian kinerja untuk sasaran program/kegiatan **Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien** sebagai berikut:

1. Indikator kinerja; Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT

Pada Triwulan I, II dan III terdiri dari, kegiatan yang dilaksanakan yaitu a) Audit kinerja; 1 unit Pusat (Sekjen) dan 11 satker vertikal yaitu Poltek STTT Bandung, Poltek AKA Bogor, SMK-SMAK Bogor, BDI Jakarta, BDI Makassar, Poltek ATI Makassar, SMK-SMAK Makassar, SMK-SMTI Makassar, SMK-SMTI Bandar Lampung, SMK-SMTI Yogyakarta dan BDI Yogyakarta b) Pra Reviu PIPK ; satker Pusat (Sekjen dan BPSDMI) dan 3 satker vertikal yaitu Poltek STMI Jakarta, Poltek APP Jakarta dan BDI Jakarta}, c) Reviu LKBMN semester II Tahun Anggaran 2019 dan Reviu LKBMN semester I Tahun Anggaran 2020 yang telah dilaksanakan terdiri dari 2 unit Pusat dan 29 satker vertikal BPSDMI yaitu 13 Pendidikan Vokasi, 9 SMK dan 7 BDI cakupan tugas Inspektorat I, d) Pengawasan/Pendampingan manajemen risiko pada: 1 unit Pusat (BPSDMI) dan 6 satker vertikal yaitu Poltek AKA Bogor, Poltek STTT Bandung, SMK-SMAK Bogor, BDI Jakarta, APP Jakarta dan STMI Jakarta, e) Monev penilaian implementasi SAKIP terhadap seluruh unit Sekjen dan BPSDMI terdiri dari 6 eselon 2 pada Sekjen dan 3 eselon 2 pada BPSDMI dan 29 satker vertikal cakupan tugas Inspektorat I, sehingga total sebanyak 38 satker pusat dan vertikal serta f) Peran pengawasan lainnya berupa pemantauan saran dan prasarana pada 3 satker yaitu Poltek AKA Bogor, Poltek STTT Bandung dan SMK-SMAK Bogor.

Pelaksanaan PKPT pada Inspektorat I telah mengalami penyesuaian karena kondisi pandemik covid 19, kegiatan tetap dilaksanakan secara maksimal, baik secara *online* dengan menggunakan sarana *zoom meeting* maupun peninjauan langsung ke satker.

Capaian indikator kinerja secara keseluruhan sebanyak 65%, dan dilanjutkan pada triwulan berikutnya.

2. Indikator kinerja; Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya

Pada indikator kinerja ini, kegiatan yang dilakukan yaitu kegiatan Reviu PIPK dan LKBMN dan Audit kinerja dengan penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya oleh dengan capaian kinerja sebanyak 70%, kegiatan masih berlanjut pada triwulan berikutnya.

### **C. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan**

Dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat I, masih ditemukan beberapa hambatan dan kendala dalam pelaksanaan antara lain:

1. Kegiatan pengawasan ke satker vertikal mengalami penundaan/pergeseran yang diakibatkan pandemik covid 19 di seluruh Indonesia, sehingga perlu dilakukan penyesuaian jadwal Program Kegiatan Pengawasan Tahunan (PKPT);
2. Adanya realokasi anggaran BPSDMI dengan seluruh satker vertikal (sekolah dan balai diklat) serta Sekretariat Jenderal dengan seluruh Biro-Biro;
3. Sampai saat terakhir laporan ini dibuat, masih terdapat perbedaan dari bagian Keuangan Sekretariat Inspektorat Jenderal karena adanya SPTJB yang belum diinput .

#### **D. Langkah Tindak Lanjut**

Langkah tindak lanjut atas hambatan dan kendala yang dihadapi pada triwulan III untuk meningkatkan kinerja Inspektorat I adalah melalui peningkatan kerjasama yang sinergis antara lain :

1. Berkoordinasi dengan Bagian Keuangan Sekretariat Inspektorat Jenderal sehingga realisasi anggaran di PP39 sesuai dengan realiasi anggaran sesungguhnya.
2. Meningkatkan koordinasi internal agar kegiatan sesuai dengan perencanaan dan waktu yang telah ditetapkan.
3. Penjadwalan dan penganggaran disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang sedang dihadapi saat ini agar realisasi dapat tercapai sesuai target.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Secara umum pelaksanaan kegiatan Inspektorat I Kementerian Perindustrian selama periode Triwulan III Tahun 2020 telah berjalan baik sesuai dengan program kerja yang telah ditentukan.

#### **A. Kesimpulan**

1. Realisasi anggaran dan fisik kegiatan Inspektorat I sampai dengan periode Triwulan III tahun 2020 sesuai aplikasi PP39 sebagai berikut:

- a. Realisasi penyerapan anggaran mencapai 61,24% atau sebesar Rp. 1.050.433.185,- dari target 80,32%.
- b. Dari sisi realisasi fisik, tingkat capaiannya sebesar 68,14% dari target sebesar 82,53%.

Realisasi anggaran dan fisik kegiatan Inspektorat I sampai dengan periode Triwulan III tahun 2020 sesuai aplikasi *e-Monitoring* sebagai berikut:

- a. Realisasi penyerapan anggaran mencapai 69,74% atau sebesar Rp. 1.196.231.390,- dari target 90,44%.
- b. Dari sisi realisasi fisik, tingkat capaiannya sebesar 72,38% dari target sebesar 87,93%.

2. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut terdapat beberapa masalah dan kendala yang dihadapi, namun dapat diselesaikan dengan baik. Upaya terhadap tingkat capaian, baik realisasi fisik maupun keuangan selalu dioptimalkan untuk mengacu kepada target yang telah ditetapkan.

3. Diharapkan pada Triwulan mendatang penyerapan anggaran dan kinerja kegiatan fisik dapat ditingkatkan lebih baik lagi sehingga memberikan dampak yang baik untuk *stakeholder* di lingkungan Inspektorat I.

## **B. Saran**

Kerjasama dan koordinasi sinergi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan Inspektorat I baik internal maupun eksternal perlu lebih ditingkatkan untuk mempertahankan kinerja yang telah dicapai dengan baik oleh Inspektorat I.

Demikian Laporan Inspektorat I periode Triwulan III Tahun 2020 untuk dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

**LAMPIRAN**  
**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN**  
**TRIWULAN - III**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**  
**INSPEKTORAT I**